



*Satya Yajna Bhakti*  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
*Provinsi Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan*  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
*Badan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia*  
Jalan Cak, Agung Tirta Sakti III Denpasar 80136, Telpom 0361 227217  
Website: [www.bakpempbali.go.id](http://www.bakpempbali.go.id) e-mail: [bakpempbali@bakpempbali.go.id](mailto:bakpempbali@bakpempbali.go.id)

Bali, 14 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi  
Setda Provinsi Bali  
di-  
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.10.800/ 2153 /SET/BKPSDM

| N<br>o | JENIS YANG DIKIRIM                               | BANYAKNY<br>A | KETERANGAN                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                | 3             | 4                                                                                                                                                               |
| 1      | Laporan LKJIP BKPSDM<br>Provinsi Bali Tahun 2022 | 1 Gabung      | Dengan hormat disampaikan<br>untuk menindaklanjuti Surat<br>Sekretaris Daerah Nomor<br>B.42.081.1/5617/RS4KS-ORG<br>Prihal Pemenuhan Data SAKIP<br>Terimakasih. |

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA BADAN**  
**KETUT LIHADNYANA**  
NIP. 19550601 198203 1 001



Bali  
Provinsi  
Berkeadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

**LKIP**

**BKPSDM PROVINSI BALI**

**TAHUN 2022**



Bali  
Provinsi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



## KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta waranugrah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala BPSDM Provinsi Bali dalam menyelenggarakan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali telah melakukan upaya terbaik agar laporan kinerja ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, khususnya Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Ditetapkan di Bali

Pada Tanggal 3 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BADAN  
KETUT LIHADNYANA  
NIP. 19560801 199203 1 001



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr

## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR                                        | i         |
| DAFTAR ISI                                            | ii        |
| IKHTISAR EKSEKUTIF                                    | iii       |
| DAFTAR TABEL                                          | iv        |
| DAFTAR GAMBAR                                         | v         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang                                     | 1         |
| B. Struktur Organisasi                                | 2         |
| C. Isu Strategis dan Permasalahan                     | 3         |
| D. Landasan Hukum                                     | 3         |
| E. Sistematika Penulisan                              | 3         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                     | <b>11</b> |
| A. Rencana Strategis                                  | 11        |
| B. Rencana Kinerja Tahunan, Program dan Kegiatan      | 13        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                  | <b>21</b> |
| A. Capaian Kinerja Organisasi                         | 21        |
| A.1. Survei Kepuasan Masyarakat                       | 22        |
| B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Kinerja | 24        |
| B.1. Analisis Keberhasilan                            | 25        |
| B.2. Solusi                                           | 29        |
| C. Realisasi Anggaran                                 | 30        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                 | <b>40</b> |
| LAMPIRAN                                              |           |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka menunjang urusan tersebut maka BKPSDM Provinsi Bali pada Tahun 2022 telah mewujudkan Pengantian Kinerja yang telah dipenjanjian dengan Gubernur dengan melaksanakan 3 program dengan didukung oleh APBD Provinsi dimana anggarannya sebesar Rp. 54.814.204.935 dan realisasi anggaran Rp. 40.820.558.078 dengan capaian sebesar 90,74% . Berikut capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator nilai evaluasi manajemen kinerja, target di tahun 2022 adalah 82,3 nilai. Nilai evaluasi manajemen kinerja pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memperoleh nilai sebesar 88,23 dengan Kategori "A-Memuaskan". Program ini didanai dari APBD dengan anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebesar Rp. 42.237.525.847 dan realisasi sebesar Rp. 30.914.854.010 dengan capaian 92,13%.
2. Program kepegawaian daerah dengan indikator Indeks sistem merit, pada Tahun 2022 target 0,60 dan realisasi Indeks sebesar 0,80 atau dengan nilai 300 masuk pada kategori IV ( Sangat Baik ). Program ini didanai dari APBD dengan anggaran sebesar Rp. 7.410.131.314 dan realisasi sebesar Rp. 6.747.731.120 dengan capaian 90,99%.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi, pada tahun 2022 target 100% dengan realisasi 100%. Program ini dengan dana sebesar Rp. 200.047.774 dan realisasi sebesar Rp. 4.167.183.526 dengan capaian 70%.
4. Hasil Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh BKPSDM Provinsi Bali melalui google form memperoleh hasil IKM pada Semester I yaitu 82,35 dengan persentase tingkat kepuasan pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan BKPSDM diperoleh 90,7%. Sedangkan pada Semester II hasil IKM diperoleh sebesar 84,12 dengan persentase tingkat



kepuasan pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan BKPSDM diperoleh 98,9%.

5. Pada tahun 2022 BKPSDM Provinsi Bali telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai wujud komitmen BKPSDM terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penghargaan yang didapat oleh BKPSDM Provinsi Bali yaitu:
- 15 Peserta Terbaik Katagori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 dan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - Katagori Implementasi Manajemen ASN terbaik dari BKN Peningkat I Katagori implementasi penerapan Manajemen kinerja dan BKN
  - Peningkat I Katagori Implementasi Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT dari BKN
  - Peningkat III Katagori Penilaian Kompetensi dari BKN
  - Kebertahanan dalam Menetapkan Sistem Matri Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dan KASN

Dikeluarkan di Bali

Pada Tanggal 3 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BADAN  
KETUT LIHADNYANA  
NIP. 19650901 199203 3 001



## DAFTAR TABEL

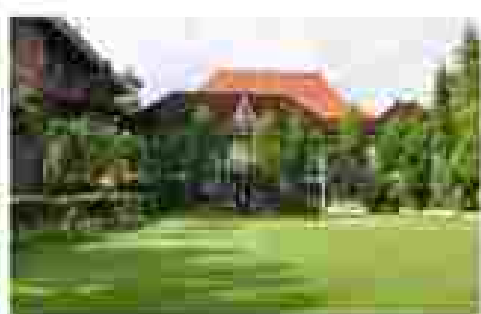
|          |                                                                                                     |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1  | Data Jumlah Pegawai ASN dan Non PNS pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022                     | 1  |
| Tabel 2  | Data Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022            | 4  |
| Tabel 3  | Data Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022 | 4  |
| Tabel 4  | Pemetaan permasalahan sebagai Isu Strategis BKPSDM Provinsi Bali                                    | 7  |
| Tabel 5  | Rencana Strategis BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2019-2023                                              | 11 |
| Tabel 6  | Rencana Kinerja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2022                                                     | 14 |
| Tabel 7  | Anggaran dan Target Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                       | 14 |
| Tabel 8  | Skala Nilai Peringkat Kinerja                                                                       | 21 |
| Tabel 9  | Capaian IKU BKPSDM Provinsi Bali                                                                    | 32 |
| Tabel 10 | Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi                                                          | 29 |
| Tabel 11 | Pelaksanaan Siklat Tahun 2022                                                                       | 27 |
| Tabel 12 | Data Pelaksanaan Assessment 2020 s/d 2022                                                           | 27 |
| Tabel 13 | Data Rekrutmen Tenaga Non PNS 2018 s/d 2022                                                         | 27 |
| Tabel 14 | Data Mutasi ASN tahun 2018 s/d 2022                                                                 | 27 |
| Tabel 15 | Data Pemberhentian PNS 2018 s/d 2022                                                                | 28 |
| Tabel 16 | Data Rekapitulasi SK yang diterbitkan Tepat Waktu 2018 s/d 2022                                     | 28 |
| Tabel 17 | Data Jumlah ASN Mendapat Sanjaja disiplin 2018 s/d 2022                                             | 28 |
| Tabel 18 | Jumlah ASN Penerima SLKS 2018 s/d 2022                                                              | 28 |
| Tabel 19 | Data Pengetangan Pendidikan ASN 2018 s/d 2022                                                       | 29 |
| Tabel 20 | Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya 2018 s/d 2022                                         | 29 |
| Tabel 21 | Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota 2018 s/d 2022      | 29 |
| Tabel 22 | Penghargaan yang dicapai oleh BKPSDM Provinsi Bali                                                  | 30 |
| Tabel 23 | Laporan Monitoring Sistem Merit Tahun 2022                                                          | 31 |
| Tabel 24 | Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                   | 34 |
| Tabel 25 | Realisasi Target Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | 35 |
| Tabel 26 | Anggaran Perprogram pada DPA Induk dan DPPA                                                         | 40 |
| Tabel 27 | Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKPSDM Provinsi Bali                                 | 41 |
| Tabel 28 | Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022                                                        | 47 |
| Tabel 29 | Ribuan Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2022                               | 48 |
| Tabel 30 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran                                     | 49 |



## DAFTAR GAMBAR

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali | 10 |
| Gambar 2 | Data Pegawai di Provinsi Bali Per 1 Januari 2023                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| Gambar 3 | Diagram Hasil Survei Semester I                                                                                                                                                                                                                                                | 23 |
| Gambar 4 | Diagram Hasil Survei Semester II                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| Gambar 5 | Hasil IKM Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| Gambar 6 | Chart Perbandingan Sasaran Anggaran dan capaian Anggaran Tahun 2018-2022                                                                                                                                                                                                       | 47 |





Bali-  
Desig Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan laporan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan indikator yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan LKIP badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan dapat:

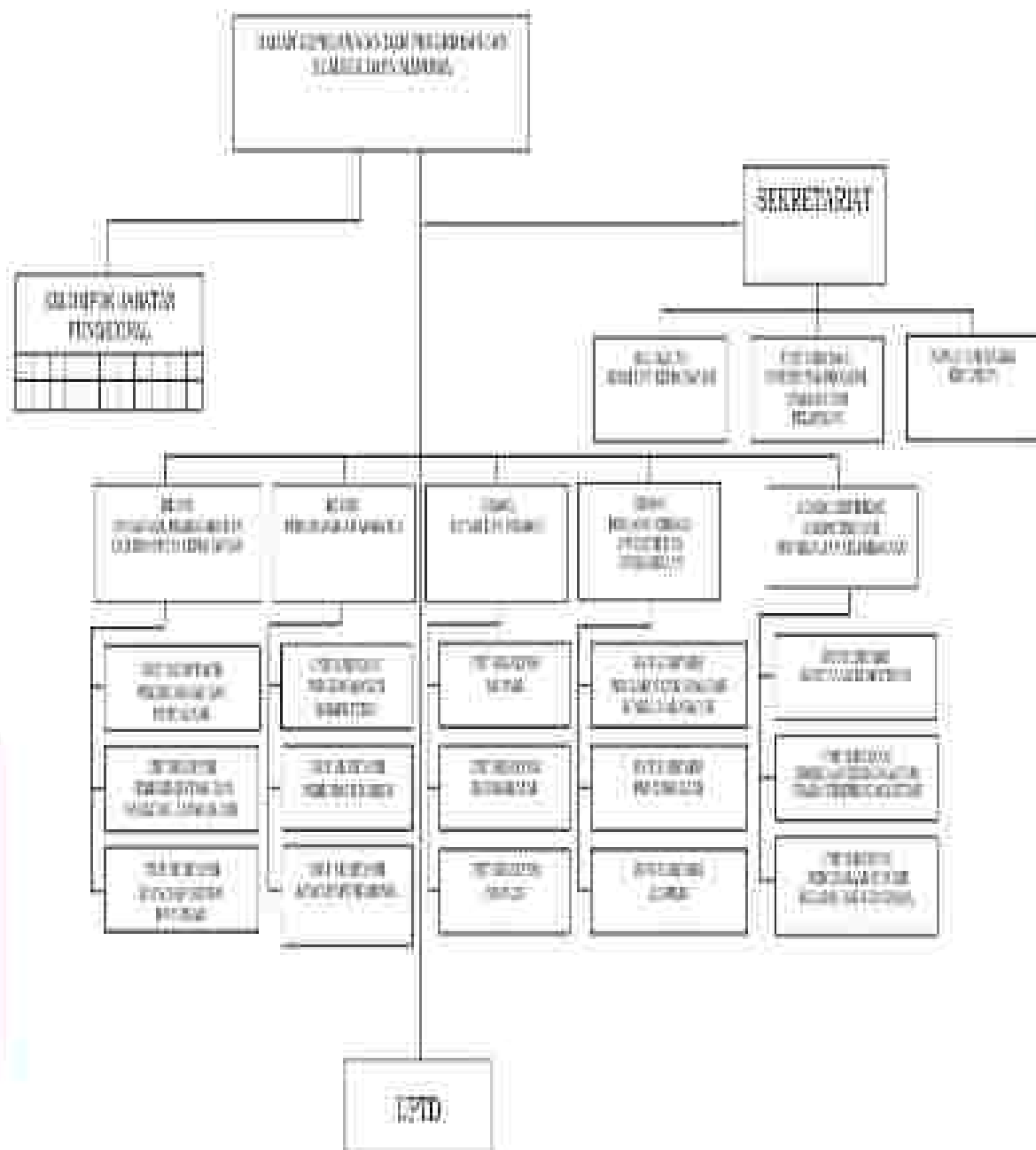
1. Memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BKPSDM Provinsi Bali
2. Memberikan Informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Provinsi Bali dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

B. Struktur Organisasi



**Gambar 1** Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali





### TUGAS POKOK

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



### FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah daerah bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berikut Data Pegawai BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2022:

**Tabel 1 Data Jumlah Pegawai ASN dan Non PNS pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022**

| NO    | Unit                                                                                              | ES I | ES II | ES III | Fungsional Pelayanan | Fungsional Manaj. | Fungsional Manaj. | Fungsional Teknis | Atasan | Pegawai | CPNS | Jumlah |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|------|--------|
| 1     | BKPSDM                                                                                            | 1    | 4     | 2      | 5                    | 17                |                   | 5                 | 15     | 11      | 2    | 53     |
| 2     | UPTD PKP                                                                                          |      | 1     | 3      | 4                    | 1                 | 1                 |                   | 5      |         | 2    | 17     |
| 3     | UPTD PKSDM                                                                                        |      | 1     | 3      | 1                    | 4                 | 11                |                   | 12     | 4       |      | 35     |
| 4     | NON PNS di Badan + UPTD (Tenaga Administrasi, Tenaga Sopir, Tenaga Pengaman, Jasa Kebersihan dll) |      |       |        |                      |                   |                   |                   |        |         |      | 111    |
| Total |                                                                                                   |      |       |        |                      |                   |                   |                   |        |         |      | 247    |

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali tahun 2022

**Tabel 2 Data Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022**

| GOLONGAN | a  | b  | c  | d  | e | JUMLAH |
|----------|----|----|----|----|---|--------|
| I        |    |    |    | 1  |   | 1      |
| II       |    |    | 5  | 3  |   | 8      |
| III      | 12 | 40 | 20 | 24 |   | 96     |
| IV       | 11 | 7  | 5  | 5  | 2 | 30     |
| TOTAL    |    |    |    |    |   | 138    |

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali tahun 2022

**Tabel 3 Data Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada BKPSDM Provinsi Bali Per Desember 2022**

| PENDIDIKAN | JUMLAH CPNS |
|------------|-------------|
| SD         | 1           |
| SMP        | -           |
| SMA        | 5           |
| D3         | 5           |
| S1         | 55          |
| S2         | 47          |
| S3         | 11          |
| TOTAL      | 136         |

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali tahun 2022



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Jumlah Sumber daya Manusia sebagai unsur penggerak di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Per Desember 2022 sebanyak 247 orang. Pegawai ASN sebanyak 138 orang dan pegawai non ASN (Tenaga Administrasi, Tenaga sopir, Tenaga Pengaman dan Jasa Kebersihan) sebanyak 111 orang. Dari 247 orang, ini terpisah di 3 unit yaitu di Induk (BKPSDM), di UPTD Penilaian kompetensi dan di UPTD PKSDM. Hasil penyetaraan jabatan pada tahun 2022 menyebabkan penambahan jumlah Pejabat Fungsional Muda. Dan 138 ASN terdapat Golongan III yang mendominasi sebesar 98 orang atau 70,59%. Golongan IV ada 2 yaitu Kepala BKPSDM Provinsi Bali dan Widyaiswara Utama. Sebagian besar pegawai di BKPSDM Provinsi Bali berpendidikan terakhir S1.

Gambar 2. Data Pegawai di Provinsi Bali Per 1 Januari 2023



Dari gambar 2 dapat diketahui data pegawai di Provinsi Bali keadaan 1 Januari 2023. Jumlah total SDM di Provinsi Bali sebesar 19.808 orang dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Bali sebanyak 10.710 orang atau 54,07% dari total SDM di Pemerintah Provinsi Bali dan jumlah pegawai non ASN OPD sebanyak 9.098 orang atau 45,93%. Dari data ini terlihat jumlah pegawai non ASN hampir menyeimbangi jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh adanya Gap kebutuhan pegawai di instansi pemerintah dimana terdapat formasi-formasi yang tidak terisi/lowong dan karena formasi tersebut terkait dengan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi unit dan harus terisi maka direkrut pegawai non ASN.

Jenjang pendidikan yang paling banyak diambil oleh ASN Provinsi Bali adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 8.916 orang atau 84,57% dan jumlah seluruh ASN. Hal ini karena pendidikan formal S1 atau diplomat IV keatas dan setingkat menempati pekerjaan di pangkat penata yang sudah menuntut atau memerlukan keahlian pada bidang tertentu dan pemahaman kaidah suatu ilmu secara mendalam. ASN di Provinsi Bali didominasi oleh kaum laki-laki dengan jumlah 5.580 orang. Golongan terbanyak untuk ASN Pemerintah Provinsi Bali yaitu golongan III dengan jumlah 5.298 orang. Kisaran umur ASN di Provinsi Bali dari terbanyak yaitu umur >60 tahun sejumlah 4.047 orang.

### C. Isu Strategis dan Pemmasalahan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan 2 isu strategis yaitu:

1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal
2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

Kedua isu strategis badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4 Penetaan permasalahan sebagai Isu Strategis BKRSDM Provinsi Bali

| No | Permasalahan                                    | Gejala                                                                                                                                                                                                   | Alasan Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan pegawai belum sesuai dengan format dan kebutuhan dalam jabatan</li> <li>2. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum semua jabatan memiliki Standar Kompetensi terutama di jabatan pelaksana</li> <li>b. Pemberian kesempatan Pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan</li> <li>c. Belum semua pegawai ASN mengikuti asesmen dalam rangka penilaian kompetensi</li> </ol> </li> </ol> |
| 2  | Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi   | Pelayanan administrasi kepegawaian secara digital belum maksimal dan menyeluruh                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pusat dalam hal ini B2D</li> <li>2. Belum maksimalnya pengembangan aplikasi SIMPEG</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### D. Landasan Hukum

Landasan Hukum Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali adalah:



Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023



Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2018 – 2023



Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali



## E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



**Pendahuluan**, yang memuat tentang latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis serta permasalahan utama, landasan hukum, dan sistematika penulisan.



**Perencanaan Kinerja**, yang menyajikan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja.



**Akuntabilitas Kinerja**, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.



**Penutup**, yang memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh BKPSDM dalam rangka peningkatan kinerjanya.



**Lampiran**, Perjanjian kinerja dan lain-lainnya yang dianggap perlu.





Rapat Pembahasan Pola Tata Kerja Pengembangan Kari Pejabat Fungsional Paica Transformasi yang Dipimpin oleh Bapak Sekda Prov. Bali



Penyerahan SK Gubernur Bali Tentang Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahun 2022



Pembukaan Peserta Pelatihan Sertifikasi Asesor Kompetensi Oleh BNSP Tahun 2022



Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIX



Reformasi Birokrasi

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

VISI : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

MISI Ke-22 : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah

### ISU STRATEGIS

1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai Belum Optimal
2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

Tabel 5-Rencana Strategis BKPSPDM Provinsi Bali Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan/Strategi                                                                        | Indikator Kinerja   | Realisasi Kinerja pada Tahun |      |      |      |      | Target Kinerja pada Tahun |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|
|    |                                                                                        |                     | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023                      | 2023 | 2023 |
| 1  | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | Indeks sistem merit | 0,52                         | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 |                           |      |      |

Rencana strategis BKPSPDM Provinsi Bali merupakan komitmen terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi guna mencapai tujuan organisasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan tujuan yaitu terwujudnya sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali dengan indikator Indeks sistem merit. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali, Sistem merit kebijakan dan manajemen PNS Provinsi berdasarkan pada kualifikasi kompetensi.



dan kinerja secara adil, wajar serta objektif untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu, cepat, pasti, dan murah. Sistem merit sebagai pedoman dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, disiplin dan pensiun pegawai. Pemberlakuan merit sistem bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Penerapan merit sistem dalam manajemen ASN dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan dan penetapan Kebutuhan

Pada aspek penyusunan dan penetapan kebutuhan, dapat dilakukan perencanaan kebutuhan ASN 5 tahunan berdasarkan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) yang dalam penyusunannya mempertimbangkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun.

### 2. Pengadaan

Pada aspek pengadaan, dilakukan dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan dan kompetitif. Dengan metode tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan berasal dari talenta-talenta terbaik dan unggul.

### 3. Pengembangan karier

Pada aspek ini dapat dilakukan kebijakan/program pengembangan karier berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui assessment, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, talent pool, dan rencana sukses berdasarkan pola karier instansi.

### 4. Promosi dan Mutasi

Pada aspek promosi dan mutasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pengisian JPT melalui seleksi terbuka. Melalui seleksi terbuka diharapkan dapat menghasilkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan sesuai kebutuhan organisasi, mengatasi spoil system dan jual beli



jabatan, serta memberikan kesempatan bagi semua pegawai untuk berkompesi.

### 5. Penilaian kinerja

Penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala (berkelanjutan) dengan menggunakan metoda yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi.

### 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Pada aspek ini dapat dilakukan dengan mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dengan membaya tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.

### 7. Jaminan dan perlindungan

Pada aspek ini dikaitkan dengan mempunyai program perlindungan untuk pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah nasional, serta menjamin kemudahan pelayanan administrasi bagi pegawai.

### 8. Sistem Informasi Kepegawaian

Pada aspek ini dilaksanakan dengan mengembangkan database digital, suatu Sistem Informasi Kepegawaian berbasis elektronik yang terpadu, sinkron, akurat dan akuntabel untuk mempermudah memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat, efektif, dan efisien kepada PNS Provinsi.

## B. Rencana Kinerja Tahunan, Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur guna mewujudkan target kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format perjanjian kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Renvu



Badan  
Kepegawaian  
dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja BKPSDM sesuai perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6 Rencana Kinerja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2022

| No | Tujuan                                                                                 | Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | Indeks sistem merit | Indeks | 0,80   |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan indeks sistem merit di tahun 2022 dengan target adalah 0,80. Target Kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi, misi dan akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Tabel 7 Anggaran dan Target Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                              | Indikator                                                                                     | Target     | Anggaran Pads DPPA |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>              |                                                                                               |            |                    |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>               | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                              | 82,5 Nilai | Rp28.762.739.973   |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                               | 82,5 Nilai | Rp11.435.800       |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang terlaksana | 11 dokumen | Rp15.961.800       |
| Kontrol dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Indikator Pefikasi Kinerja 2022 | Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah                                                       | 1 dokumen  | Rp14.472.000       |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                    | 100 persen | Rp12.451.579.573   |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

|                                                                                                                    |                                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah jumlah STP/STPA gaji dan tunjangan                              | 3 jenis golongan | Rp18.481.577.976 |
| Administrasi Umum Penyelenggaraan Daerah                                                                           | Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik              | 100 persen       | Rp604.389.140    |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia                 | 2 jenis          | Rp3.218.000      |
| Penyediaan Perakasan dan Peralengkapan Kantor                                                                      | Jumlah perakasan dan peralengkapan kantor                              | 4 jenis          | Rp148.109.440    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah logistik yang tersedia                                          | 2 jenis          | Rp91.175.000     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah barang cetak dan penggandaan                                    | 7 golongan       | Rp15.763.800     |
| Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan                                                             | Jumlah bahan baku/bahan/ media cetak yang tersedia                     | 7 jenis          | Rp12.764.000     |
| Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                  | Bidang kerja pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan daerah | 12 bulan         | Rp301.368.000    |
| Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan tepat waktu    | 100 persen       | Rp939.315.000    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah pengadaan sarana gedung kantor                                  | 50 jenis         | Rp118.318.000    |
| Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | Persentase terpenuhinya layanan umum kantor                            | 100 persen       | Rp1.281.938.205  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyalur                                                                                     | Jumlah jasa surat menyalur yang tersedia                               | 300 surat        | Rp3.000.000      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 3 jenis          | Rp79.005.000     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                      | 11 jenis         | Rp999.318.100    |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik       | 100 persen       | Rp977.594.052    |
| Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan/ Kanvasan Otak Operasional atau Peralangan | Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas                               | 10 jenis         | Rp999.804.111    |
| Pemeliharaan Asst Tatal Lainnya                                                                                    | Jumlah pemeliharaan asst tatal lainnya                                 | 1 jenis          | Rp127.569.800    |
| Pemeliharaan Peralalatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                      | 4 jenis          | Rp75.000.000     |
| Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah perbaikan gedung kantor yang terpelihara                        | 15 jenis         | Rp115.010.000    |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                         | Indeks Motivasi Kerja                                                  | 0,8 Indeks       |                  |



Badan Kepegawaian Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

|                                                                                        |                                                                                                                                   |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          | Persentase dana, Informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian                                                                  | 100 Persen          | Rp6.179.999.186 |
| Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | jumlah rencana kebutuhan ASN                                                                                                      | 1.400 orang         | Rp1.071.066     |
| Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah formal ASN yang diadakan                                                                                                   | 400 formal          | Rp6.909.409.760 |
| Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pengadaan Sistem Informasi Manajemen | Jumlah In Penda yang ditetapkan                                                                                                   | 70251               | Rp119.126.227   |
|                                                                                        | Jumlah data yang termutasi/intran dalam sistem sistem informasi kepegawaian                                                       | 1900 dokumen        | Rp143.119.344   |
| <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                          | Persentase Pemindahan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien          | 100 Persen          | Rp908.295.044   |
| Pengadaan Mutasi ASN                                                                   | 1. Jumlah pemindahan PNS antar instansi<br>2. Jumlah Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan             | 12.400 orang<br>20% | Rp69.754.243    |
| Pengadaan Kariristik Pegawai ASN                                                       | Jumlah 25 Kariristik Pegawai yang diberikan setiap waktu dan Kariristik Bagi Bunka Bagi UPT                                       | 2800 SK             | Rp68.300.443    |
| Pengadaan Promosi ASN                                                                  | Jumlah PNS yang di Promosikan                                                                                                     | 87 orang            | Rp176.300.443   |
| <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                     | Persentase Meningkatkan Kompetensi Pegawai ASN                                                                                    | 10 Persen           | Rp239.221.792   |
| Pengadaan Pendidikan lanjutan ASN                                                      | Jumlah PNS yang diberikan (in Tagas Belajar, Ujian Diklat, Ujian Kariristik Pegawai Berprestasi Jatah, dan Penerimaan Gelar       | 300 PNS             | Rp120.132.896   |
| Koordinasi dan Kapasitas Peningkatan Diklat                                            | Data PNS yang akan diundang ke kemandiriannya                                                                                     | 1000 orang          | Rp57.976.443    |
| fasilitas Pengembangan karir dalam jabatan fungsional                                  | Jumlah SK jabatan Fungsional                                                                                                      | 200 SK              | Rp66.012.443    |
| <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                         | Persentase Layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan sesuai SOP | 100 persen          | Rp237.266.792   |
| Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                    | Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki hasil penilaian kinerja kategori Baik                                                  | 87 persen           | Rp90.401.443    |
| Pengadaan Penerimaan Penghargaan Bagi Pegawai                                          | Jumlah PNS yang diberikan mendapatkan penghargaan SUCS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi                        | 1000 orang          | Rp134.423.443   |
| Peminaan Disiplin ASN                                                                  | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin                                                                                    | 36 TC               | Rp94.072.699    |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Pengadaan Penyediaan Pengangan Daerah ASN                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah pengadaan ASN yang diangkat                                                                                                                                                                                                                                  | 1 kasus    | Rp18.808.000    |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                         | Persentase ASN yang lulus pengembangan 50M berbasis kompetensi                                                                                                                                                                                                      | 100 persen |                 |
| Sertifikasi, Kefembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                             | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lulus diklat manajerial dan fungsional                                                                                                                                                                      | 100 persen | Rp1.177.161.758 |
| Pemecutan Karyawan Tetap dan Bersisa Sertifikasi Kompetensi, Pengembangan Kemandirian, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kefembagaan, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prestasi, Sertifikasi Fungsional | Jumlah karyawan tetap dan bersisa sertifikasi kompetensi, Pengembangan Kemandirian, tenaga pengembangan kompetensi, sumber belajar, kefembagaan, Pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan prestasi, sertifikasi fungsional | 3 dokumen  | Rp217.288.994   |
| Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 | Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemerintah, Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                             | 115 orang  | Rp444.542.900   |
| Pelaksanaan Kefembagaan Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah dokumen kefembagaan antar lembaga                                                                                                                                                                                                                            | 1 kasus    | Rp204.890.000   |
| <b>UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    | 82,5 Nilai |                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                                          | 100 persen | Rp65.809.000    |
| Pemecutan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah dokumen SPK, SPK gaji dan tunjangan                                                                                                                                                                                                                          | 3 dokumen  | Rp28.808.000    |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                           | 100 persen | Rp25.405.720    |
| Pemecutan Peralatan dan Peningkatan Kantor                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah peralatan dan peningkatan kantor                                                                                                                                                                                                                             | 2 kasus    | Rp6.125.720     |
| Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                                                                                                                                                       | Relevansi waktu pelaksanaan riset koordinasi dan konsultasi perangkat daerah                                                                                                                                                                                        | 10 kasus   | Rp18.888.000    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                    | Persentase terpenuhinya layanan umum kantor                                                                                                                                                                                                                         | 100 persen | Rp367.735.136   |
| Pemecutan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Pemecutan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         | 2 layanan  | Rp167.155.136   |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                   | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terakumulasi baik                                                                                                                                                                                                  | 100 persen | Rp11.890.000    |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

|                                                                                                          |                                                                               |                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Pemeliharaan, Peralipatan Barang dan Prosesnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                               | 3 jenis                                       | Rp11.887.000    |
| <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                        | Indeks Matrik Sistem                                                          | 0-5 Indeks                                    | Rp880.687.800   |
| Pengembangan Kompetensi ASN                                                                              | Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN                                | 100 Persen                                    | Rp880.687.800   |
| Pengadaan Assessment Center                                                                              | Jumlah kerjasama timbangan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai | 3 metode<br>1000 orang<br>diukur<br>1. Jamnya | Rp960.687.800   |
| <b>UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia</b>                                                  |                                                                               |                                               |                 |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                              | 52,3 Nilai                                    |                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | Persentase dokumentasi keuangan terpenuhi tepat waktu                         | 100%                                          | Rp927.251.000   |
| Penyediaan Gar dan Tuntutan ASN                                                                          | Jumlah dokumen SKH, SKP, gal dan tuntutan                                     | 14 dokumen                                    | Rp927.281.000   |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                  | 100%                                          | Rp269.299.410   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor                                         | Jumlah jenis komponen listrik/bangunan yang terpasang                         | 3 jenis                                       | Rp93.002.800    |
| Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor                                                            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                      | 23 jenis                                      | Rp43.383.511    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                         | Jumlah logistik yang diadakan                                                 | 1 logistik                                    | Rp88.000.000    |
| Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komunitas BKKD                                                         | Berkas waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan komunitas perangkat daerah      | 10 bulan                                      | Rp94.080.000    |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana baik                 | 100%                                          | Rp828.300.000   |
| Pengadaan Barang dan Prosesnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor                                      | 3 jenis                                       | Rp828.300.000   |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | Persentase jasa penunjang layanan umum kantor tercapai tepat waktu            | 100%                                          | Rp2.213.807.294 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                  | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                             | 2 jasa                                        | Rp511.000.000   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                    | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                             | 3 jenis                                       | Rp1.793.507.294 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik              | 100%                                          | Rp275.376.344   |
| Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Cetak Operasional atau Lainnya | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                                           | 1 unit                                        | Rp274.388.344   |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                                                                             | 1 pemeliharaan | Rp455.500.000    |
| Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terencana                                                                                                                                                                                              | 18 jenis       | Rp204.300.000    |
| Peningkatan Pelayanan RSUD                                                                                                                                                                                               | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal LPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia                                                                                                                                               | 100%           | Rp10.457.313.000 |
| Pelayanan dan Pemanggilan Pelayanan RSUD                                                                                                                                                                                 | Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal LPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia                                                                                                                                               | 100%           | Rp10.457.313.000 |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
| Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                           | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi                                                                                                                                                                                | 100%           | Rp397.045.790    |
| Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Rangka Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konvensional, Perangkat Daerah, dan Organisasi | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam rangka kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan konvensional, penyelenggara urusan pemerintahan konvensi, perangkat daerah dan organisasi | 1 dokumen      | Rp5.364.550      |
| Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konvensional, Perangkat Daerah, dan Organisasi                                        | Jumlah peserta yang lulus sesuai yang berbasis uli kompetensi teknis                                                                                                                                                                          | 120 orang      | Rp391.702.140    |
| Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                        | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lulus dilatih manajemen dan fungsional                                                                                                                                                | 100%           | Rp3.486.333.190  |
| Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Rangka bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional                                                                                                                                 | 1 dokumen      | - Rp0            |
| Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                  | Jumlah peserta yang lulus sertifikasi kepemimpinan, fungsional dan Prajabatan                                                                                                                                                                 | 354 orang      | Rp3.486.333.190  |





BKPSDM Provinsi Bali Mendapatkan  
Terbaik Kategori Unit Pengelola  
Pelayanan Publik (UPP) Kompetensi:  
Pengalaman Pengukuran Pelayanan Publik  
No. 1

Pemerintah Provinsi Bali Mendapatkan  
Indeks Nilai Matrasari Dengan Nilai  
Tinggi Dari X.XIII



Kepemimpinan Atas Pekerjaan Sangat Baik  
Dalam Pengukuran Sistem Pempinaan Tugas  
Tahun 2021



Pemerintah Provinsi Bali Mendapatkan Penghargaan BHN Award Sebanyak 4 Kategori :  
Kategori Implementasi Manajemen, ASB Terbaik, Pengukuran I Kategori Implementasi  
Penerapan Manajemen Kinerja, Pengukuran I Kategori Implementasi Pengukuran, Pengukuran  
Data Dalam Informasi dan CAT dan Pengukuran III Kategori Pengukuran Kompetensi



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan Indikator Kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang dijanjikan Kepala BKPSDM Provinsi Bali dengan Bapak Gubernur tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kategori Peringkat Kinerja | Kode        |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | 91 ≤ 100                         | Sangat Baik                | Hias Tua    |
| 2   | 76 ≤ 90                          | Tinggi                     | Hias Muda   |
| 3   | 66 ≤ 75                          | Sedang                     | Kuning Tua  |
| 4   | 51 ≤ 65                          | Rendah                     | Kuning Muda |
| 5   | ≤ 50                             | Sangat Rendah              | Merah       |

Sumber: Peraturan Menteri 88 Tahun 2017

Pengukuran Capaian Kinerja BKPSDM Provinsi Bali tahun 2022 diukur berdasarkan pada cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

Tabel 9 Capaian IKU BKPSDM Provinsi Bali

| No | Tahun Sasaran Strategis                                                                | Sasaran Kinerja     | Realisasi Tahun 2020 | 2021    |           |         | 2022    |           |         | Tahun Akhir Tahun Rencana 2021 | Capaian realisasi indikator 2021 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                        |                     |                      | Tetapan | Realisasi | Capaian | Tetapan | Realisasi | Capaian |                                |                                  |
| 1  | 2                                                                                      | 3                   | 4                    | 5       | 6         | 7       | 8       | 9         | 10      | 11                             | 12                               |
| 1  | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | Indeks Merit Sistem | 0,63                 | 0,61    | 0,80      | 131,13  | 0,60    | 0,80      | 100     | Sangat Baik                    | 88,77                            |

Pada Tahun 2020 realisasi indeks sistem merit sebesar 0,63 mengalami peningkatan ditahun 2021 dengan target 0,61 dan realisasi 0,80 dengan capaian 131,13%. Di Tahun 2021 berdasarkan Keputusan komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP-KASN/C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan Bahwas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus,tiga puluh), dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh). Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ini berlaku selama 2 (dua) tahun, maka di tahun 2022 dengan target sistem merit 0,80 dan realisasi 0,80 didapatkan capaian sebesar 100% yang termasuk kriteria sangat baik dengan kode hijau muda.

#### A.1 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali sebagai badan yang salah satu fungsinya melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan terkait dengan promosi, mutasi, kenaikan pangkat, pemrosesan SK, pemrosesan tinjauan belajar, assessment, dan pelaksanaan diklat teknis perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM). Survei kepuasan



masyarakat menjadi satu upaya yang diperlukan sebagai salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik dan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dengan diperolehnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pengukuran kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKPSDM Provinsi Bali dilakukan dengan penyebaran survei melalui google form ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Pada tahun 2022, survei dilakukan sebanyak 2x yaitu pada semester I dan semester II. Responden survei adalah seluruh pejabat administrator dan pengawas serta beberapa orang Pelaksana. Penentuan jumlah sampel minimum dihitung dengan menggunakan formula Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% (toleransi error 0.05) dengan jumlah pegawai yang ada di Pemerintahan Provinsi Bali. Dari hasil pengolahan data diperoleh persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKPSDM Provinsi Bali sebagai berikut:

Pada semester I persentase jawaban responden terhadap pernyataan "Saya puas dengan pelayanan BKPSDM secara keseluruhan", diperoleh hasil: 238 responden (29,9%) menyatakan sangat setuju, 480 responden (60,8%) menyatakan setuju, 52 responden (6,5%) menyatakan netral (ragu-ragu), 9 responden (1,2%) menyatakan tidak setuju, dan 12 orang responden (1,5%) menyatakan sangat tidak setuju.

Gambar 3 Diagram Hasil Survei Semester I



Gambar 4 Diagram Hasil Survei Semester II



Pada diagram diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap kualitas layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan "Saya puas dengan pelayanan BKPSDM secara keseluruhan", diperoleh hasil: 322 responden (43.9%) menyatakan sangat setuju, 403 responden (55%) menyatakan setuju, 6 responden (0.60%) menyatakan kurang setuju setuju, dan 2 orang responden (0.30%) menyatakan tidak setuju.

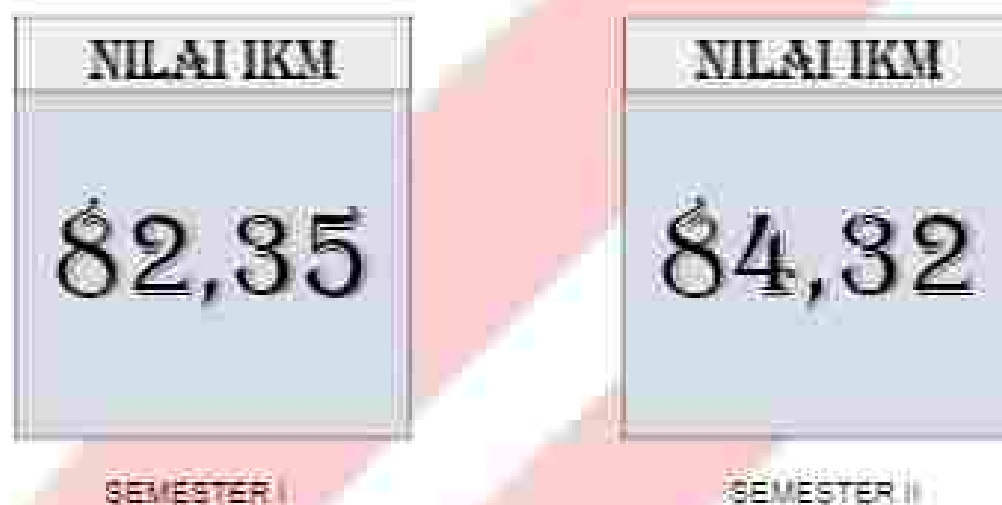
Dengan menggunakan data di atas diperoleh persentase tingkat kepuasan pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2022 sebesar 98.9%. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan pada semester I dimana disemester I mendapat persentase sebesar 90,7%.



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

## INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM) BKPSDM PROVINSI BALI TAHUN 2022



Gambar 5. Hasil IKM Tahun 2022

Dengan target IKM di tahun 2022 yaitu 80 nilai indeks dan dari hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat pada google form didapatkan hasil IKM terhadap kualitas layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2022 sebesar 84,32 meningkat dibandingkan pada semester I dimana IKM BKPSDM Provinsi Bali sebesar 82,35. Dengan meningkatnya IKM yang melebihi target ini membuktikan bahwa sistem pelayanan kepegawaian BKPSDM sudah optimal.

### B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Badan





# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Tabel 11 Pelaksanaan Diklat Tahun 2022

| No                         | Jenis Pendidikan dan Pelatihan (diklat)     | Jumlah Peserta (Orang) | Luas (Orang) | Tingkat Luas (Orang) |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Diklat Kepemimpinan</b> |                                             |                        |              |                      |
| 1                          | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II      | 74                     | 7            | -                    |
| 2                          | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II BLUD | 53                     | 53           | -                    |
| 3                          | Pelatihan Kepemimpinan Administrator        | 74                     | 74           | -                    |
| 4                          | Pelatihan Kepemimpinan Administrator BLUD   | 37                     | 32           | -                    |
| 5                          | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas             | 30                     | 30           | -                    |
| 6                          | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas BLUD        | 84                     | 84           | -                    |
| <b>Diklat Teknis</b>       |                                             |                        |              |                      |
| 1                          | Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah | 30                     | 30           | -                    |
| 2                          | Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah   | 30                     | 30           | -                    |
| 3                          | Diklat perencanaan pembangunan daerah       | 30                     | 30           | -                    |
| <b>Pelatihan Dasar</b>     |                                             |                        |              |                      |
| 1                          | Pelatihan Dasar CPNS Gol II dan III         | 166                    | 166          | -                    |
| 2                          | Pelatihan Dasar CPNS BLUD                   | 763                    | 763          | -                    |

Tabel 12 Data Pelaksanaan Assessment 2020 s/d 2022

| No | Jumlah Peserta assessment |      |      |
|----|---------------------------|------|------|
|    | 2020                      | 2021 | 2022 |
| 1  | 15                        | 1040 | 1311 |

Tabel 13 Data Rekrutmen Tenaga Non PNS 2018 s/d 2022

| NO | Keterangan                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Penempatan Tenaga Non PNS pada Tahun Berjalan            | 106  | 148  | 215  | 136  | 141  |
| 2  | Jumlah total Tenaga Non PNS (Provinsi Bali) pada tahun berjalan | 5684 | 7213 | 8703 | 9261 | 9083 |

Tabel 14 Data Mutasi ASN tahun 2018 s/d 2022

| No | Keterangan                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah dan Kab/Kota/Pusat Mutasi ke Dalam Provinsi Bali | 25   | 24   | 23   | 27   | 28   |
| 2  | Jumlah dan Provinsi Bali Mutasi Keluar Kab/Kota/Pusat   | 13   | 10   | 8    | 6    | 9    |



Tabel 15 Data Pemberhentian PNS 2018 s/d 2022

| No. | Keterangan                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah PNS yang diberhentikan karena memasuki batas usia pensiun            | 743  | 803  | 654  | 817  | 626  |
| 2   | Jumlah PNS yang diberhentikan karena atas permintaan sendiri (pensiun muda) | 10   | 11   | 2    | 1    | 14   |
| 3   | Jumlah PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia                        | 23   | 97   | 90   | 106  | 43   |

Tabel 16 Data Rekapitulasi SK yang diterbitkan Tepat Waktu 2018 s/d 2022

| No. | Jenis SK                               | 2018        |             | 2019        |             | 2020        |             | 2021        |             | 2022        |             |
|-----|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                        | Diterbitkan | Tepat Waktu | Diterbitkan | Tepat Waktu | Diterbitkan | Tepat Waktu | Diterbitkan | Tepat Waktu | Diterbitkan | Tepat Waktu |
| 1   | SK Pengabdian                          | 180         | 180         | 113         | 113         | 174         | 174         | 170         | 170         | 120         | 120         |
| 2   | SK Penilaian Penguatan                 | 3481        | 3481        | 2478        | 2478        | 2728        | 2728        | 3029        | 3029        | 3271        | 3271        |
| 3   | Kerangka Gaji Buruh                    | 776         | 776         | 535         | 535         | 171         | 171         | 12          | 12          | 34          | 34          |
| 4   | SK Penetapan masa kerja                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 48          | 48          | 118         | 118         |
| 5   | SK Penetapan gaji berdasarkan golongan | 12          | 12          | 17          | 17          | 34          | 34          | -           | -           | -           | -           |
| 6   | SK lain                                | 5           | 5           | 1           | 1           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 7   | SK jabatan Struktural                  | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 13          | 13          |

Tabel 17 Data Jumlah ASN Mendapat Sanksi disiplin 2018 s/d 2022

| No. | Jenis Sanksi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Ringan       | 1    | 3    | 3    | 1    | 2    |
| 2   | Sedang       | -    | 1    | 0    | 0    | -    |
| 3   | Barat        | 2    | 4    | 2    | 2    | 2    |

Tabel 18 Jumlah ASN Penerima SLKS 2018 s/d 2022

| No. | Jenis SLKS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------------|------|------|------|------|------|
| 1   | 10 tahun   | 315  | 315  | 1099 | 1099 | 921  |
| 2   | 20 tahun   | 159  | 165  | 485  | 410  | 176  |
| 3   | 30 tahun   | 233  | 214  | 385  | 357  | 308  |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Tabel 19 Data Pengembangan Pendidikan ASN 2018 s/d 2022

| No | Jabatan                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3  | Jumlah PNS yang memperoleh persetujuan belajar/tipe belajar | 107  | 153  | 109  | 173  | 127  |

Tabel 20 Data PNS yang akan dikembangkan Kompetensinya 2018 s/d 2022

| No | Jenis Pengembangan Kompetensi                                             | Jumlah PNS Tahun (n) |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                           | 2018                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural dan kompetensi teknis | -                    | -    | -    | 1000 | 497  |

Tabel 21 Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota 2018 s/d 2022

| No | Jenis Sertifikasi                                                                             | Jumlah ASN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PSI tahun 2018                                         | 46         |
| 2  | Uji Sertifikasi Kompetensi PSI bagi Jabatan Fungsional PSI dan Disipasi Tahun 2018            | 34         |
| 3  | Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018 Dana APBD                  | 39         |
| 4  | Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Dana APBD Kontribusi  | 33         |
| 5  | Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Dana APBD Kontribusi | 33         |
| 6  | Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 Dana APBD                                | 150        |
| 7  | Uji Kompetensi Polisi Kehutanan Tahun 2018                                                    | 34         |
| 8  | Uji Sertifikasi Kompetensi PSI Tahun 2019                                                     | 23         |
| 9  | Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PSI tahun 2019                                         | 38         |
| 10 | Uji Sertifikasi Kompetensi PSI Tahun 2020                                                     | 9          |
| 11 | Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PSI tahun 2021                                         | 60         |
| 12 | Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PSI tahun 2022                                         | 40         |
| 13 | Uji Sertifikasi Kompetensi Polisi Kehutanan Tahun 2021                                        | 15         |
| 14 | Pelatihan Kapemimpolnas Nasional Tk. II Angkatan XXX Tahun 2021                               | 60         |



Tabel 22 Penghargaan yang dicapai oleh BKPSDM Provinsi Bali

| TAHUN 2021 |                                                                           |                                                                                                                          |                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | BIDAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN DATA MANUSIA PROVINSI BALI | 15 Peserta Terbaik Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ka-4 | Memori Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 2          | Pemerintah Provinsi Bali                                                  | Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik                                                                              | BKN                                                          |
| 3          | Pemerintah Provinsi Bali                                                  | Peringkat I Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja                                                            | BKN                                                          |
| 4          | Pemerintah Provinsi Bali                                                  | Peringkat I Kategori Implementasi Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT                                    | BKN                                                          |
| 5          | Pemerintah Provinsi Bali                                                  | Peringkat III Kategori Penilaian Kompetensi                                                                              | BKN                                                          |
| 6          | Pemerintah Provinsi Bali                                                  | Atas Keberhasilannya Menetapkan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021                          | Komisi Aparatur Sipil Negara                                 |

## B.2 Solusi

Sesuai dengan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP-KASN/CN/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, KASN merekomendasikan kepada Gubernur Bali selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan diturunkan ke kepada BKPSDM Provinsi Bali untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek berikut:



Tabel 23 Laporan Monitoring Sistem Merit Tahun 2022

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pencapaian/Target/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahun 2022                                                                                                                                | Tahun 2023                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Penyempurnaan/ pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data penilaian kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta</p> | <p>1. Aplikasi SIMATA telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG melalui API dimana SIMATA mengambil profil biodata Pegawai dari aplikasi SIMPEG</p> <p>2. Aplikasi assessment center akan segera diintegrasikan dengan SIMPEG setelah menyelesaikan proses assessment pengujian keastahan aplikasi yang dicertifikasikan oleh Dinas Kominfo</p> <p>3. Aplikasi Penilaian Kinerja (SINERPO) telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG melalui API dimana SINERPO mengambil profil biodata Pegawai dari aplikasi SIMPEG. SINERPO dan SIMPEG juga akan dikembangkan sehingga nilai Penilaian Kinerja dari SINERPO akan ditampilkan dalam SIMPEG</p> | <p>Sudah Tersaksana</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Sudah Tersaksana, untuk pengambilan data dari SINERPO akan terlaksana Januari tahun 2024</p> | <p>Bidang Pengadaan, Pembentukan Dan Informasi Kepegawaian</p> |
| <p>Menetapkan pedoman pengadaan ASN dalam satu kesatuan peraturan yang komprehensif terkait seluruh CPNS, PPPK dan juga pengalihan dan istatansi lain</p>                                                                                                                                            | <p>Menyusun petunjuk teknis tentang Pengadaan ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>April – Mei 2023</p>                                                                                                                   | <p>Bidang Pengadaan, Pembentukan Dan Informasi Kepegawaian</p> |
| <p>1. Memperbaiki penilaian kompetensi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis</p>                                                                                                                                                        | <p>1. Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan assessment secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber daya asesor yang ada serta telah melaksanakan penyesuaian sistem dan metode untuk mempercepat penyelesaian laporan individu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. Peratapan jadwal dan integrasi sistem dan metode melaksanakan awal Januari 2023</p>                                                 | <p>Bidang Pengembangan</p>                                     |
| <p>2. Implementasi pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai Peraturan</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>2. Melakukan review terhadap Peraturan Kepala SKD Nomor 1 Tahun 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>2. Telah ditetapkan Pedoman Manajemen Talenta yang dikembangkan</p>                                                                    |                                                                |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Mentan PANRB No. 3/2020, dilaksanakan berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur (khususnya aspek potret) sehingga terwujud rencana sukses untuk setiap jabatan.

tentang pedoman manajemen talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur melalui PanIA SKP-SDM Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2022. File Pedoman Manajemen talenta <https://drive.google.com/file/d/1BvG4UHVd73eODp06s39SDpM90xSHAL/view?usp=sharing>

1. Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasik maupun non-klasik

1. Melaksanakan penyusunan rencana tindakan/ hasil analisis GAP kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1. Telah dilaksanakan analisis gap kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali <https://data.kesenjangankompetensi>

Implementasi secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai acuan dalam pengembangan kariir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta

Menyusun rencana sukses pada jabatan target/ jabatan yang rendah dan ditetapkan oleh Sekda

Juli dan Desember 2021

Sidang Mutasi dan Promosi

1. Memperkuat sistem manajemen kinerja pegawai melalui pemantauan (monitoring) kinerja yang terstruktur (malap kinerja) dan berkala untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai

1. Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan RB Nomor 2 Tahun 2022

Mai dan Desember 2023

Sidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

2. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai target kerja dan merumuskan strategi untuk mengatasinya

2. Menyusun Laporan Analisis Kesenjangan Kinerja dan Merumuskan Strategi Dalam Mengatasinya

Maret 2023



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

1 Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kerja

2 Mengintegrasikan database terkait disiplin, pelanggaran kode etik dan kode pematu dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional

1. Sasat ini sudah dilaksanakan melalui pengut 30 tahun 2022 dengan 70% kinerja dan 30% kehadiran

2. Database pelanggaran Disiplin, Kode Etik dan Kode Pematu pada SIMPEG Provinsi Bali sedang dalam Proses Pengintegrasian dengan

Januari s.d Desember 2022

Januari s.d Desember 2023

Bidang Penilaian  
Kinerja  
Aparatur dan  
Pelanggaran

Memperluas fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kehdasan dan administrasi kepegawaian

1. Menyambungkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mempermudah seluruh pegawainya melakukan peremajaan data yang diperlukan dalam SIMPEG

2. Memastikan dokumen digital yang terdapat dalam SIMPEG untuk pengajuan layanan administrasi kepegawaian melalui SIASN

3. Memastikan fitur layanan administrasi kepegawaian dalam SIMPEG secara bertahap

Februari

Sudah terlaksana

Tahun 2023

Bidang Pengadaan,  
Pembentukan dan  
Informasi  
Kepegawaian



Tabel 24 Analisis Keberhasilan dan kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| No                                                                   | Indikator Kinerja Utama                                                                | Indikator Kinerja   | Capaian (%) | Program                                               | Nilai Evaluasi                                                 | Capaian (%) | Keberhasilan |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali |                                                                                        |                     |             |                                                       |                                                                |             |              |
| 1                                                                    | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | Indeks sistem merit | 100         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                               | 84,82       | Memuaskan    |
|                                                                      |                                                                                        |                     |             | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                            | Indeks Sistem Merit                                            | 0,80        | Memuaskan    |
|                                                                      |                                                                                        |                     |             | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA              | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi | 100         | Memuaskan    |

Dalam mencapai tujuan strategis yaitu terwujudnya sistem merit dalam manajemen PNS Pemerintah Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali ditunjang oleh 3 program yaitu

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja nilai evaluasi manajemen kinerja dimana pada tahun 2022 BKPSDM Provinsi Bali memiliki target sebesar 82,5 nilai dan realisasi sebesar 86,23 dengan katagori "(A)-Memuaskan" dengan capaiannya 104,82%
- 2) Program Kepegawaian dengan indikator indeks sistem merit dimana tahun 2022 BKPSDM Provinsi Bali memiliki target 0,80 dan realisasi sebesar 0,80 katagori IV ( Sangat Baik ) dengan capaiannya 100%
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi dimana tahun 2022 BKPSDM Provinsi Bali memiliki target sebesar 100 % dan realisasinya sebesar 100%



Tabel 25 Realisasi Target Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| No                                                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                               | Melihat                                                                                           | Target            | Realisasi          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |                                                                             |                                                                                                   |                   |                    |
|                                                               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>                                                           | <b>82,9 Nilai</b> | <b>86,33 Nilai</b> |
|                                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terakumulasi | 13 dokumen        | 13 dokumen         |
|                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terakumulasi  | 12 dokumen        | 12 dokumen         |
|                                                               | Penyusunan dan Peninjauan Laporan Daerah Terhadap Kinerja Pejabat Group 500 | Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah                                                           | 12 dokumen        | 12 dokumen         |
|                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Jumlah laporan keuangan yang disusun                                                              | 3 laporan         | 3 laporan          |
|                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah dokumen SPK/SPK-nya dan keuangan                                                           | 28 dokumen        | 28 dokumen         |
|                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Jumlah Administrasi Umum yang terakumulasi                                                        | 6 administrasi    | 6 administrasi     |
|                                                               | Penyediaan Transportasi Pejabat Jawat/Pemangku Bergelar Kantor              | Jumlah jasa transportasi transportasi yang terakumulasi                                           | 2 juta            | 2 juta             |
|                                                               | Penyediaan Pakaian dan Pengalihan Kantor                                    | Jumlah pakaian dan pengalihan kantor                                                              | 3 juta            | 3 juta             |
|                                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah logistik yang terakumulasi                                                                 | 1 juta            | 1 juta             |
|                                                               | Penyediaan Barang Daerah dan Pengadaan                                      | Jumlah pengadaan barang-barang daerah dan pengadaan                                               | 7 dokumen         | 7 dokumen          |
|                                                               | Penyediaan Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Pemangku-Untaian          | Jumlah bahan bakar, pemeliharaan yang terakumulasi                                                | 1 juta            | 1 juta             |
|                                                               | Pengembangan Pagar Koordinasi dan Kebijakan SPK                             | Pengembangan pelaksanaan rapat koordinasi dan kebijakan perangkat daerah                          | 12 bulan          | 12 bulan           |
|                                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Jumlah jasa layanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi                               | 1 juta            | 1 juta             |
|                                                               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung, Sarana dan Fasilitas Lainnya         | Jumlah pengadaan sarana gedung kantor                                                             | 3 juta            | 3 juta             |
|                                                               | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang terakumulasi                                             | 3 juta            | 3 juta             |
|                                                               | Pengadaan Jasa Bakti Lainnya                                                | Jumlah jasa bakti lainnya yang terakumulasi                                                       | 300 surat         | 300 surat          |
|                                                               | Pengadaan Jasa Komunikasi, Telekomunikasi dan Data                          | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya IT dan lain-lain                                              | 2 juta            | 2 juta             |
|                                                               | Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                                                 | 10 juta           | 10 juta            |
|                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                           | 4 pemeliharaan    | 4 pemeliharaan     |





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                    | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi                                                                                                                                                                         | 100 persen       | 100 persen      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Sertifikasi, Rekreasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                    | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan lulus dinas manajerial dan fungsional                                                                                                                                           | 0                | 0%              |
| Penyusunan Jadwal Tes dan Sertifikasi Kompetensi, Pengadaan Fasilitas, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Daya, Logistik, Pengembangan Kompetensi Pribadi Daerah, (Aspek Keperawatan, Keperawatan dan Fisikologi, Sertifikasi Fungsional) | Jumlah jadwal tes dan sertifikasi kompetensi, Pengadaan Fasilitas, tenaga pengembang kompetensi, sumber daya, Logistik, pengembangan kompetensi pribadi daerah (aspek keperawatan, keperawatan dan Fisikologi, sertifikasi fungsional) | 0 dokumen        | 0 dokumen       |
| Penilaian Sertifikasi Kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota                                                                                                                                                       | Jumlah sertifikasi kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Kota                                                                                                                                                                       | 115 orang        | 115 orang       |
| Penilaian Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah dokumen penilaian aparatur                                                                                                                                                                                                      | 1 surat          | 1 surat         |
| <b>UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                                                                                       | 82,5 nilai       | 84,33 nilai     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat                                                                                                                                                                                                    | 3 laporan        | 3 laporan       |
| Pemetaan Dik dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                              | Jumlah dokumen DTP, DTP gaji dan tunjangan                                                                                                                                                                                             | 22 jenis dokumen | 3 jenis dokumen |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terakumulasi                                                                                                                                      | 13 dokumen       | 13 dokumen      |
| Pemetaan Perawatan dan Peningkatan Kantor                                                                                                                                                                                                   | Jumlah perbaikan dan peningkatan kantor                                                                                                                                                                                                | 3 jenis          | 3 jenis         |
| Pengembangan Kapasitas Manajerial dan Kelembagaan DPRD                                                                                                                                                                                      | Pelatihan waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah                                                                                                                                                           | 11 bulan         | 11 bulan        |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                        | Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia                                                                                                                                                                                      | 1 jasa           | 1 jasa          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                           | 3 layanan        | 2 layanan       |
| Pemeriksaan Berekas Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                      | Jumlah Pemeriksaan Berekas Milik Daerah                                                                                                                                                                                                | 3 pemeriksaan    | 3 pemeriksaan   |
| Pemeriksaan Rutinitas Daerah dan Pemantauan Gedung, Perencanaan, Pengawasan, dan                                                                                                                                                            | Jumlah pemeriksaan gedung kantor yang terakumulasi                                                                                                                                                                                     | 3 jenis          | 3 jenis         |
| PROGRAM KEPESAWAHAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                  | Indeks Moral Sistem                                                                                                                                                                                                                    | 0,8 Indeks       | 0,80 Indeks     |
| Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah asran pengembangan kompetensi ASN                                                                                                                                                                                               | 1 jenis          | 1 jenis         |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

| Pengadaan Keperluan Dasar                                                                                       | Jumlah karyawan langsung terdapat dan jumlah pengalihan pemertoran regional | 1. 3 metode<br>2. 1000 orang<br>3. 10 orang<br>4. 1 lembaga | 1. 3 metode<br>2. 100 orang<br>3. 10 orang<br>4. 1 lembaga |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia</b>                                                         |                                                                             |                                                             |                                                            |
| <b>PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>Nilai Efisiensi Manajemen Kinerja</b>                                    | <b>81,5 Nilai</b>                                           | <b>88,23 Nilai</b>                                         |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase dokumen keuangan terakumulasi tepat waktu                        | 100%                                                        | 100%                                                       |
| Penyediaan Gak dan Tunjangan ASN                                                                                | Jumlah dokumen SPT/SPM gaji dan tunjangan                                   | 14 dokumen                                                  | 3 dokumen                                                  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                | 100%                                                        | 100%                                                       |
| Penyediaan komposisi instansi untuk Peningkatan Anggaran Kantor                                                 | Jumlah jenis komposisi instansi dan anggaran yang tersedia                  | 3 jenis                                                     | 3 jenis                                                    |
| Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah fasilitas dan perlengkapan kantor                                    | 13 jenis                                                    | 13 jenis                                                   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah logistik yang disediakan                                             | 1 logistik                                                  | 1 logistik                                                 |
| Pengelolaan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Bentuk waktu pelaksanaan riset koordinasi dan konsultasi perangkat daerah   | 11 bulan                                                    | 11 bulan                                                   |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana baik               | 100%                                                        | 100%                                                       |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah pengadaan sarana gedung kantor                                       | 3 jenis                                                     | 3 jenis                                                    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase jasa penunjang layanan umum kantor terakumulasi tepat waktu      | 100%                                                        | 100%                                                       |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumbat Daya Air dan Listrik                                                       | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                           | 12 jasa                                                     | 12 jasa                                                    |
| Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kantor                                                                           | Jumlah jasa perawatan umum kantor                                           | 3 jenis                                                     | 3 jenis                                                    |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik            | 100%                                                        | 100%                                                       |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan, Peralat dan Peralatan Kantor dan Dinas/Departemen atau Lembaga | Jumlah pemeliharaan sarana dinas                                            | 9 unit                                                      | 9 unit                                                     |
| Pemeliharaan Perbaikan Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                           | 1 pemeliharaan                                              | 1 pemeliharaan                                             |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kemampuan, Kualitas, Jarak dan Frekuensi Gedung Pertemuan, Tangkapan Jarak                                                                                                                               | Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran                                                                                                                                                                     | 14 juta   | 14 juta   |
| Peningkatan Efisiensi SLUD                                                                                                                                                                               | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia                                                                                                                     | 100%      | 100%      |
| Pelayanan dan Peningkat Pelayanan SLUD                                                                                                                                                                   | Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia                                                                                                                      | 100%      | 100%      |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                          | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi                                                                                                                                                       | 100%      | 100%      |
| Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                           | Persentase ASN peserta pelatihan yang lulus tes tes                                                                                                                                                                  | 100%      | 100%      |
| Pengukuran Standar Peningkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Reger Komposisi Tokoh Umum, Inti, dan Militer bagi jabatan Administrasi Pembangunan, Peningkat Daerah Peningkat dan Pusat Pemerintahan Umum | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam reger kompetensi teknis umum, intil dan pihan bagi jabatan administrasi pembangunan, Administrasi Pembangunan, Peningkat Daerah Peningkat dan Pusat Pemerintahan Umum | 1 dokumen | 1 dokumen |
| Pengembangan Pengembangan Kompetensi Tokoh Umum, Inti, dan Militer bagi jabatan Administrasi Pembangunan, Peningkat Daerah Peningkat dan Pusat Pemerintahan Umum                                         | Jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis                                                                                                                                               | 80 orang  | 80 orang  |
| Sertifikasi, Kembangan, Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                          | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, fungsional dan jabatan                                                                                                                                             | 164 orang | 165 orang |
| Pengukuran Standar Peningkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Reger bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                 | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional                                                                                                        | 0         | 0         |
| Pengembangan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat                                                                        | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, fungsional dan jabatan                                                                                                                                             | 164 orang | 165 orang |

Tabel 25 menunjukan target dan realisasi kinerja BKPSDM Provinsi Bali selama tahun 2022. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagai besar realisasi kinerja telah mencapai bahkan melebihi target kinerja. Hal ini tercapai karena komitmen BKPSDM Provinsi Bali dalam mewujudkan target indeks sistem merit. Terdapat satu sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang tidak direalisasikan karena kurikulumnya sudah ada pada kurikulum dari LAN.



### C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategisnya, Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali melaksanakan Program dan kegiatan yang pada hakikatnya adalah sesuai dengan tugas pokok fungsi dalam bidang kepegawalan serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali dan melaksanakan Renstra BKPSDM Provinsi Bali. Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali melaksanakan 3 Program yaitu

Tabel 26 Anggaran Perprogram pada DPA Induk dan DPPA

| No    | Organisasi | Program                                               | DPA Induk         | DPPA              |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | BKPSDM     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 15.943.279.332 | Rp 25.782.738.973 |
|       |            | Program Kepegawalan                                   | Rp 5.038.277.514  | Rp 7.685.443.514  |
|       |            | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia              | Rp 909.748.884    | Rp 1.177.361.734  |
| 2     | UPTD PKP   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 2.347.931.548  | Rp 400.338.855    |
|       |            | Program Kepegawalan                                   | Rp 380.687.800    | Rp 380.687.800    |
| 3     | UPTD PKSDM | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 15.355.783.270 | Rp 15.073.945.018 |
|       |            | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia              | Rp 4.972.980.820  | Rp 4.083.285.980  |
| TOTAL |            |                                                       | Rp 50.080.622.879 | Rp 54.914.304.935 |

Dari Tabel diatas program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi mengalami peningkatan anggaran disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada 2 kegiatan yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adanya peralatan gaji dimana yang semua gaji berada dimasing-masing UPTD BKPSDM dan UPTD PKP dipusatkan ke Badan (Induk) dan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat penambahan anggaran untuk belanja modal personal computer dan belanja modal barang bercorak kesenian. Realisasi anggaran belanja perprogram kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Tabel 27 Capaian Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan BKPSDM Provinsi Bali

[illegible]

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

[illegible]





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

[illegible]

Dari Tabel 7 dapat dijelaskan yaitu:

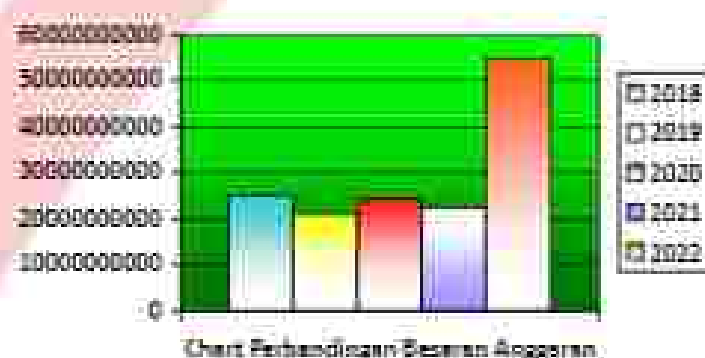
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Induk BKPSDM Provinsi Bali ditunjang oleh 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp26.762.739.973 dan realisasinya sebesar Rp25.637.631.716 dengan capaian 95,80 % sedangkan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali ditunjang oleh 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan besarnya anggaran sebesar Rp400.839.856 dan realisasi sebesar Rp 385.156.027 dengan capaian 98,58%. Pada UPTD PKSDM, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ditunjang oleh 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp15.073.946.013 dan realisasinya sebesar Rp12.881.614.203 dengan capaian 85,46 %
- Program Kepegawaian Daerah di Induk BKPSDM Provinsi Bali ditunjang oleh 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp7.055.443.514 dan realisasinya sebesar Rp6.491.698.638 dengan capaian 92,01% sedangkan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali ditunjang oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan besarnya anggaran sebesar Rp360.687.800 dan realisasi sebesar Rp258.832.295 dengan capaian 70,96%.
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di Induk BKPSDM Provinsi Bali ditunjang oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.177.381.784 dan realisasinya sebesar Rp816.927.889 dengan capaian 69,39% sedangkan di UPTD PKSDM Pemerintah Provinsi Bali ditunjang oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan besarnya anggaran sebesar Rp4.083.235.930 dan realisasi sebesar Rp3.350.255.537 dengan capaian 82,05%

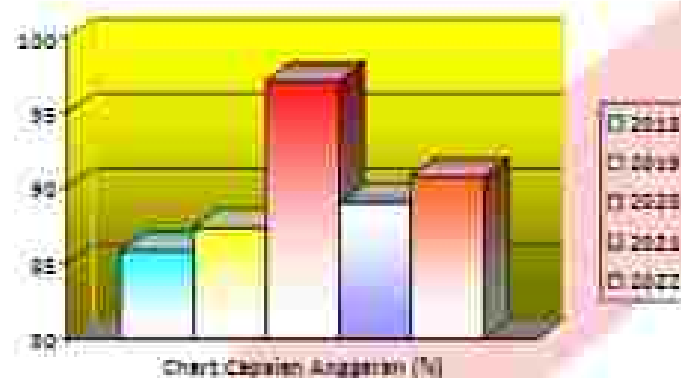


Tabel 28. Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2018- 2022

| Tahun | Anggaran       | Realisasi         | Capaian % |
|-------|----------------|-------------------|-----------|
| 2018  | 25.186.632.037 | 21.627.456.470,00 | 85,87     |
| 2019  | 21.832.713.734 | 18.378.433.581,22 | 87,38     |
| 2020  | 34.344.803.145 | 23.658.605.166,39 | 97,18     |
| 2021  | 32.465.813.363 | 26.022.342.851,00 | 89,04     |
| 2022  | 54.914.304.935 | 49.829.568.678,00 | 90,74     |

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, BKD berubah menjadi BKPSDM dengan meleburnya 2 organisasi menjadi 1 maka bertambah pula tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sehingga dalam melaksanakan program-programnya terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatannya. Hal ini menyebabkan anggaran BKPSDM tahun 2022 dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari 5 Tahun terakhir anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengalami fluktuasi, anggaran belanja tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp 1.858.989.782 atau 7,84%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran. Tahun 2022 besarnya anggaran sebesar Rp54.914.304.935 dan realisasinya sebesar Rp 49.829.568.678,00 dengan capaian 90,74%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar chart berikut.





Gambar 6. Chart Perbandingan Besar Anggaran dan capaian Anggaran Tahun 2018-2022

Anggaran tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dikelompokkan menjadi dua kelompok belanja yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2022

| Kelompok Belanja                          | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Capaian %    |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Belanja Operasi</b>                    | <b>53.459.659.935</b> | <b>48.600.135.442</b> | <b>90,91</b> |
| Belanja Pegawai                           | 23.875.637.874        | 22.930.045.270        | 95,94        |
| Belanja Barang dan Jasa                   | 29.584.022.061        | 25.670.142.172        | 86,77        |
| <b>Belanja Modal</b>                      | <b>1.458.215.000</b>  | <b>1.229.380.236</b>  | <b>84,48</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 957.135.000           | 763.954.494           | 79,89        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 209.500.000           | 205.014.342           | 99,50        |
| Belanja Modal Jalan, jembatan dan Jangkar | 30.000.000            | 9.601.500             | 32,00        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 178.580.000           | 157.800.000           | 88,38        |
| <b>Total</b>                              | <b>54.917.874.935</b> | <b>49.829.515.678</b> | <b>90,74</b> |

Belanja Operasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sepenuhnya berupa belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan belanja barang dan jasa sedangkan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Belanja Modal digunakan untuk mendanai Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Capaian realisasi belanja operasi sebesar 90,91% dan anggaran sedangkan capaian realisasi belanja modal sebesar 84,48% dari anggaran.

Tabel 30 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan dan Sasaran                                                                     | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran         |                |         | Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------|----------------|---------|-----------|
|    |                                                                                        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran         | Realisasi      | Capaian |           |
| 1  | Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali | 0,80              | 0,80      | 100     | Rp54.914.304.935 | 49.829.556.673 | 90,74   | 0,093     |

Terwujudnya sistem merit dalam manajemen PNS Provinsi Bali pada tahun 2022 dengan target indeks sistem merit 0,80 didapatkan realisasi indeks sistem merit sebesar 0,80 dengan capaian sebesar 100 %. Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program-program guna mendukung sistem merit pada DPPA 2022 sebesar Rp54.914.304.935 dan telah merealisasikan sebesar 49.829.556.673 dengan capaian 90,74% dengan tingkat efisiensi 0,093.



## BAB IV

# PENUTUP

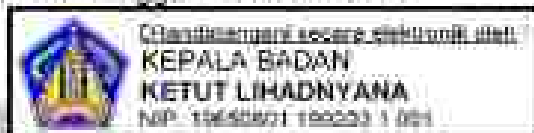
Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Capaian kinerja BKPSDM selama Tahun 2022 yaitu:

- Berdasarkan Permendagri 85 Tahun 2018, capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang mencapai 100% termasuk kriteria sangat baik. Hal ini didukung pula oleh Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP.KASN/IX/2021 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus tiga puluh) dan Indeks 0.80 (nol koma delapan puluh).
- Hasil survei kepuasan masyarakat dimana pada semester II persentase jawaban responden terhadap pernyataan "saya puas dengan pelayanan BKPSDM secara keseluruhan", sebesar 98.9%. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan pada semester I dimana disemester I mendapat persentase sebesar 90.7%. Sedangkan dengan target IKM ditahun 2022 yaitu 80 nilai indeks pada Semester II diperoleh IKM sebesar 84.32 yang meningkat dibandingkan pada semester I dimana IKM BKPSDM Provinsi Bali sebesar 82.26. Dengan meningkatnya IKM yang melebihi target, ini membuktikan bahwa sistem pelayanan kepegawaian BKPSDM sudah optimal.

Ditetapkan di Bali

Pada Tanggal 3 Januari 2023



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

# LAMPIRAN



Revisi  
Keputusan  
KEMENKES

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



**NOMOR : B. 10.050/2283/SET/BKPSDM**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI BALI**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI BALI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Bali  
Provinsi  
Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI.**

**KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
  - Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
  - Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
  - Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 3 Januari 2022



**H. KETUT LIHADNYANA, M.M**  
NIP. 19650601 199203 1 001



Bali  
Provinsi  
Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggantikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI  
NOMOR : B.10.050/2283/SET/BKPSDM  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI BALI.

Susunan Keanggotaan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Bali.

- A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Bali
- B. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Bali
- C. Sekretaris : Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan  
Program, Evaluasi dan Pelaporan
- D. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian  
dan Informasi Kepegawaian
  2. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
  3. Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi
  4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur  
Dan Penghargaan
  5. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan  
Pengelolaan Kelembagaan
  6. Sub Koordinator Unit Substansi  
Perencanaan dan Pengadaan
  7. Sub Koordinator Unit Substansi  
Pemberhentian dan Fasilitas Layanan  
ASN
  8. Sub Koordinator Unit Substansi Data dan  
Sistem Informasi
  9. Sub Koordinator Unit Substansi  
Pengembangan Kompetensi
  10. Sub Koordinator Unit Substansi  
Pembinaan Karier
  11. Sub Koordinator Unit Substansi Jabatan  
Fungsional



Bali  
Provinsi  
Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

12. Sub Koordinator Unit Substansi Mutasi
13. Sub Koordinator Unit Substansi  
Kepangkatan
14. Sub Koordinator Unit Substansi Promosi
15. Sub Koordinator Unit Substansi Penilaian  
dan evaluasi Kinerja Aparatur
16. Sub Koordinator Unit Substansi  
Penghargaan
17. Sub Koordinator Unit Substansi Disiplin
18. Sub Koordinator Unit Substansi  
Sertifikasi Kompetensi
19. Sub Koordinator Unit Substansi  
Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga  
Pengembang Kompetensi
20. Sub Koordinator Unit Substansi  
Pengelolaan Sumber Belajar dan  
Kerjasama
21. Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian
22. Kepala Sub Bagian Keuangan
23. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi  
Pegawai
24. Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi  
Sumber Daya Manusia
25. Pelaksana Unit Substansi Penyusunan  
Program, Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI BALI



**Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA**  
NIP. 19650601 199203 1 001



Bali  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI BALI**

**NOMOR B 10.050/ 2282 /SET/BKPSDM**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA PROVINSI BALI**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Perangkat Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);)
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014,
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata-Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
14. Peraturan Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Sistem Tanda Tangan Elektronik

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini

KEDUA

- Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2018-2023

KETIGA

- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 3 Januari 2022



Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA  
NIP. 19650601 199203 1 001



Bali  
Kepegawaian  
Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI**

**Tugas Pokok:** Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**Fungsi:**

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan pedoman dan tugas dan fungsinya

| Kinerja Utama/<br>Outcome/Tujuan/Sasaran                   | Indikator<br>Kinerja<br>Utama | Penjelasan/Form Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Data                  | Pemangungjawab       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| TERWUJUDNYA SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PNS PROVINSI BALI | INDEKS SISTEM MERIT           | <p>1) Hasil Penilaian Penerapan sistem merit menjadi dasar penetapan tingkat penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah yang meliputi : kategori, nilai, Indeks dan sebutan.</p> <p>2) Tingkat penerapan sistem merit sebagaimana dimaksud sebagai berikut :</p> <p>a) Kategori IV, nilai 325-400 dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik;</p> <p>b) Kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik;</p> <p>c) Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6,sebutan kurang</p> <p>d) Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk.</p> <p>3) KASN menetapkan tingkat penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi Tim Penilai</p> <p>(Formulir Penilaian Mandiri Sistem Merit Oleh Tim Penilai Sistem Merit Instansi Terlampir)</p> | Komisi Aparatur Sipil Negara | BKPSDM Provinsi Bali |

Ditetapkan di Bali  
 14 Januari 2022  
**KETUA BADAN KEPEGAWAIAN  
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
  
**LOKETULIHADNYANA, M.M**  
 NIP. 19650601 199203 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 110/KEP.KASN/C/XI/2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT

DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA. 110/PMPSM/KASN/XI/2021 pada tanggal 25 November 2021, perlu menetapkan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775).



BPS  
Badan  
Pengelolaan  
Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPS

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

KESATU : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus tiga puluh), dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh).

KEDUA : Berdasarkan pada Diktum KESATU di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Gubernur Bali selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan

Penyempurnaan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta;

b. Pengadaan

Menetapkan pedoman pengadaan ASN dalam satu kesatuan peraturan yang komprehensif terkait rekrutmen CPNS, PPPK dan juga pengalihan dari instansi lain;

c. Pengembangan Karier

1) Memperkuat penilaian kompetensi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;

2) Implementasi pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020, dilaksanakan berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur (khususnya aspek potensial) sehingga tersusun rencana sukses untuk setiap jabatan;



Bali  
Provinsi  
Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

- 3) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal;

d. Promosi dan Mutasi

Implementasi secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta;

e. Manajemen Kinerja

- 1) Memperkuat sistem manajemen kinerja pegawai melalui pemantauan (monitoring) kinerja yang terstruktur (dialog kinerja) dan berkala untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai;
- 2) Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai target kerja dan merumuskan strategi untuk mengatasinya;

f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

- 1) Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kerja;
- 2) Mengintegrasikan database terkait disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional;

g. Sistem Informasi

Meningkatkan fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan administrasi kepegawaian.

KETIGA

1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang penilaian sistem meritnya



Bali  
Pemerintah  
Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

telah ditetapkan dalam kategori IV (Sangat Baik), dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif, apabila Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

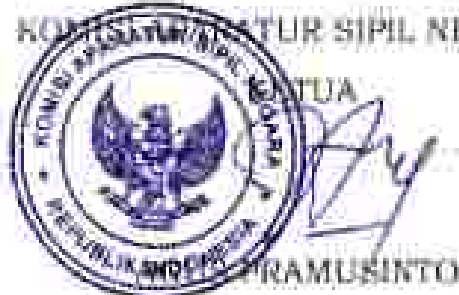
**KEEMPAT** : Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk apabila seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua telah dilaksanakan seluruhnya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2021

KOMISARIS APARATUR SIPIL NEGARA

  
KETUA  
PRAMUSINTO

Tembusan Kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara.



Badan  
Kepegawaian  
Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



පළාත් පාලන ආයතන  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
පළාත් පාලන ආයතන  
INSPEKTORAT DAERAH

පළාත් පාලන ආයතන, කොට්ඨාස, නිවෙස්, පළාත් පාලන ආයතන  
JALAN D.I. KANDIA TAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENIPASAR (40235)

පළාත් පාලන ආයතන

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: [inspekturan@calprov.go.id](mailto:inspekturan@calprov.go.id) WEBSITE: <https://inspekturat.balitprov.go.id>

## LAPORAN HASIL EVALUASI

### IMPLEMENTASI

#### SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P )

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 20202

PADA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI BALI

NOMOR : B-09.700.7260/IR.IV/ITPROV  
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2022



Bali  
Pemerintah  
Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK



පළාත් පාලන ආයතන  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
පළාත් පාලන ආයතන විකල්ප  
INSPEKTORAT DAERAH

රාජ්‍ය මහල, පාලන මණ්ඩපය, බලි, ඉන්දුනේෂියාව  
JALAN GO. PAWUNTAN NOMOR 14 UTI MANDALA, DENPASAR (80280)  
TELEFON (0361) 840031  
EMAIL [inspektur@indonesia.go.id](mailto:inspektur@indonesia.go.id) WEBSITE <http://inspektur.baliprov.go.id>

Bali, 8 Agustus 2022

Nomor : B.09.700/7260/IR.IV/ITPROV  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP Tahun 2021

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

di-

Denpasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penunjukan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 3050 Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022.
2. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2021, dengan tujuan :



Bali  
Provinsi  
Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

4. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 86,23 dengan kategori **"(A) – MEMUASKAN"**. Hasil penilaian atas masing-masing aspek dan komponen akuntabilitas kinerja secara rinci disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut:

| NO           | KOMPONEN                              | NILAI BOBOT   | NILAI EVALUASI |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.           | Perencanaan Kinerja                   | 30,00         | 30,00          |
| 2.           | Pengukuran Kinerja                    | 25,00         | 19,68          |
| 3.           | Pelaporan Kinerja                     | 15,00         | 14,10          |
| 4.           | Evaluasi Internal                     | 10,00         | 6,85           |
| 5.           | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi | 20,00         | 15,58          |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>100,00</b> | <b>86,23</b>   |

5. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
  - 1) Rencana Aksi atas kinerja menjabarkan target kinerja ke dalam target periodik sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
  - 2) Melakukan monitoring terhadap pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.



b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan semesteran);
- 2) Penerapan pengukuran kinerja tidak hanya diterapkan pada tingkat manajemen namun pada semua level dan dilakukan secara berjenjang;
- 3) Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja;
- 4) Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan kinerja perangkat daerah dipublikasikan/diupload ke dalam website;
- 2) Menyempurnakan penyajian informasi kinerja LKIP yang akan datang, antara lain menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi;

d. Evaluasi Internal

- 1) Hasil pelaksanaan evaluasi rencana aksi agar ditindak lanjuti dalam bentuk langkah – langkah kerja ;
- 2) Meningkatkan kualitas atas program sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan ataupun kegagalan suatu program. Evaluasi atas program dilakukan untuk menjawab atau menyimpulkan apakah ada perubahan (dampak) terhadap suatu kondisi yang terjadi selama program tersebut dijalankan, bukan sekedar terlaksananya kegiatan dan anggaran yang diserap. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan manajemen kinerja unit organisasi;



• **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

- 1) Perencanaan Penetapan Target capaian kinerja agar diperhitungkan dengan baik, sehingga dapat dicapai dan ukuran kinerjanya jelas serta terukur;
- 2) Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan target, informasi mengenai kinerja dapat capai dan diandalkan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

INSPEKTUR,  
  
**I WAYAN SUGIADA**  
NIP. 19651231 198003 1 179



Reformasi Birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
PROVINSI BALI**

| NO                                  | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                  | SKPD           |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                     |                                                                                                        | Y              | NILAI        |
| 1                                   | 2                                                                                                      | 3              | 4            |
| <b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b> |                                                                                                        | <b>100,00%</b> | <b>30,00</b> |
| 1                                   | <b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>                                                                     | <b>100,00%</b> | <b>10,00</b> |
| a.                                  | <b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>                                                                          | <b>100,00%</b> | <b>2,00</b>  |
| 1                                   | Renstra SKPD telah disusun                                                                             | Y              | 1,00         |
| 2                                   | Renstra telah memuat tujuan                                                                            | Y              | 1,00         |
| 3                                   | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)                         | A              | 1,00         |
| 4                                   | Tujuan telah disertai target keberhasilannya                                                           | A              | 1,00         |
| 5                                   | Dokumen Renstra telah memuat sasaran                                                                   | Y              | 1,00         |
| 6                                   | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran                                                 | A              | 1,00         |
| 7                                   | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan                                                            | A              | 1,00         |
| 8                                   | Renstra telah menyajikan IKU                                                                           | A              | 1,00         |
| 9                                   | Renstra telah dipublikasikan                                                                           | Y              | 1,00         |
| b.                                  | <b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>                                                                           | <b>100,00%</b> | <b>5,00</b>  |
| 10                                  | Tujuan telah berorientasi hasil                                                                        | A              | 1,00         |
| 11                                  | ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik | A              | 1,00         |
| 12                                  | Sasaran telah berorientasi hasil                                                                       | A              | 1,00         |
| 13                                  | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik     | A              | 1,00         |
| 14                                  | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                  | A              | 1,00         |
| 15                                  | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan             | A              | 1,00         |
| 16                                  | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD                                                     | A              | 1,00         |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

|     |                                                                                                           |       |         |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 17  | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan                                       |       | A       | 1,00  |
| c.  | <b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>                                                                          | 3,00  | 100,00% | 3,00  |
| 18  | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran                     |       | A       | 1,00  |
| 19  | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan           |       | A       | 1,00  |
| 20  | Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala                                                             |       | A       | 1,00  |
| II. | <b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>                                                                  | 20,00 | 100,00% | 20,00 |
| a.  | <b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>                                                         | 4,00  | 100,00% | 4,00  |
| 1   | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun                                                         |       | Y       | 1,00  |
| 2   | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun                                                                     |       | Y       | 1,00  |
| 3   | PK telah menyajikan IKU                                                                                   |       | A       | 1,00  |
| 4   | PK telah dipublikasikan                                                                                   |       | Y       | 1,00  |
| b.  | <b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>                                                         | 10,00 | 100,00% | 10,00 |
| 5   | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>                                                                   |       | A       | 1,00  |
| 6   | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik |       | A       | 1,00  |
| 7   | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                     |       | A       | 1,00  |
| 8   | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran                                                            |       | A       | 1,00  |
| 9   | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai                          |       | A       | 1,00  |
| 10  | Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra                                                             |       | A       | 1,00  |
| 11  | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)       |       | A       | 1,00  |
| 12  | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada                                                                       |       | Y       | 1,00  |



Badan  
Anggaran  
Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

|                                    |                                                                                                                                            |       |         |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 13                                 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja                                                           |       | A       | 1,00  |
| 14                                 | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja |       | Y       | 1,00  |
|                                    |                                                                                                                                            |       |         |       |
| c.                                 | <b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>                                                                                       | 6,00  | 100,00% | 6,00  |
| 15                                 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran                                                                             |       | Y       | 1,00  |
| 16                                 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan                                                              |       | A       | 1,00  |
| 17                                 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala                                                                     |       | A       | 1,00  |
| 18                                 | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan                                                             |       | A       | 1,00  |
| 19                                 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV                      |       | A       | 1,00  |
|                                    |                                                                                                                                            |       |         |       |
| <b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b> |                                                                                                                                            | 25,00 | 76,75%  | 19,69 |
| I.                                 | <b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>                                                                                                           | 5,00  | 100,00% | 5,00  |
| 1                                  | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal                                                          |       | Y       | 1,00  |
| 2                                  | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya                                                  |       | A       | 1,00  |
| 3                                  | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja                                                                                                |       | A       | 1,00  |
| 4                                  | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan                                                                                               |       | Y       | 1,00  |
|                                    |                                                                                                                                            |       |         |       |
| II.                                | <b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>                                                                                                         | 12,50 | 80,00%  | 10,00 |
| 5                                  | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik                                                                                            |       | A       | 1,00  |
| 6                                  | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja                                                                                                     |       | A       | 1,00  |
| 7                                  | IKU unit kerja telah selaras                                                                                                               |       | A       | 1,00  |



Badan  
Pengkajian dan  
Evaluasi Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

|      |                                                                                                                                                                       |       |         |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|      | dengan IKU IP                                                                                                                                                         |       |         |       |
| 8.   | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                                                      |       | A       | 1,00  |
| 9.   | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya                                                                                  |       | A       | 1,00  |
| 10.  | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya                                                              |       | A       | 1,00  |
| 11.  | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang                                                                                                                  |       | A       | 1,00  |
| 12.  | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan                                                                                                                             |       | A       | 1,00  |
| 13.  | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)                                                                     |       | T       | -     |
| 14.  | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi                                                                                                 |       | T       | -     |
|      |                                                                                                                                                                       |       |         |       |
| III. | <b>IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>                                                                                                                                 | 7,50  | 62,50%  | 4,69  |
| 15.  | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran                                                                                             |       | B       | 0,75  |
| 16.  | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja                                                                                                                        |       | B       | 0,50  |
| 17.  | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya                                                                                                        |       | B       | 0,50  |
| 18.  | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i> |       | B       | 0,75  |
| 19.  | IKU telah <i>direviu secara berkala</i>                                                                                                                               |       | B       | 0,75  |
| 20.  | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala                                                               |       | B       | 0,50  |
|      |                                                                                                                                                                       |       |         |       |
|      | <b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>                                                                                                                                     | 15,00 | 94,00%  | 14,10 |
| I.   | <b>PEMEMUHAN PELAPORAN (3%)</b>                                                                                                                                       | 3,00  | 100,00% | 3,00  |
| 1.   | Laporan Kinerja telah disusun                                                                                                                                         |       | Y       | 1,00  |
| 2.   | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu                                                                                                                         |       | Y       | 1,00  |
| 3.   | Laporan Kinerja telah di upload                                                                                                                                       |       | Y       | 1,00  |



Badan  
Pengawasan  
Keuangan dan  
Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

|     |                                                                                                                                                                      |             |                |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
|     | kedalam website                                                                                                                                                      |             |                |             |
| 4   | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU                                                                                                         |             | A              | 1,00        |
| II  | <b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>                                                                                                                            | <b>7,50</b> | <b>100,00%</b> | <b>7,50</b> |
| 5   | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome                                                                                    |             | A              | 1,00        |
| 6   | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan                                                                                       |             | A              | 1,00        |
| 7   | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja                                                                                            |             | A              | 1,00        |
| 8   | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan |             | A              | 1,00        |
| 9   | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya                                                                               |             | A              | 1,00        |
| 10  | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi                                                                |             | A              | 1,00        |
| 11  | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan                                                                                                             |             | A              | 1,00        |
| III | <b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>                                                                                                                          | <b>4,50</b> | <b>80,00%</b>  | <b>3,60</b> |
| 12  | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja                                                                                   |             | Y              | 1,00        |
| 13  | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan                                                                                                 |             | B              | 0,75        |
| 14  | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi                                                   |             | B              | 0,75        |
| 15  | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja                                                                                                   |             | B              | 0,75        |
| 16  | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja                                                                                                     |             | B              | 0,75        |



Badan  
Pengkajian  
dan Evaluasi  
Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

|                                                       |                                                                                                                 |              |               |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>                     |                                                                                                                 | <b>10,00</b> | <b>68,52%</b> | <b>6,85</b>  |
| I.                                                    | <b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>                                                                                  | <b>2,00</b>  | <b>85,50%</b> | <b>1,71</b>  |
| 1                                                     | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya                                    |              | Y             | 1,00         |
| 2                                                     | Evaluasi program telah dilakukan                                                                                |              | Y             | 1,00         |
| 3                                                     | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan                                                          |              | B             | 0,67         |
| 4                                                     | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan                     |              | B             | 0,75         |
| II.                                                   | <b>KUALITAS EVALUASI (6%)</b>                                                                                   | <b>5,00</b>  | <b>85,33%</b> | <b>3,27</b>  |
| 5                                                     | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program                                         |              | B             | 0,75         |
| 6                                                     | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan |              | B             | 0,75         |
| 7                                                     | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan           |              | B             | 0,75         |
| 8                                                     | Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja                                         |              | C             | 0,50         |
| 9                                                     | Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan                           |              | C             | 0,50         |
| 10                                                    | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode                                          |              | B             | 0,67         |
| III.                                                  | <b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>                                                                                | <b>3,00</b>  | <b>62,50%</b> | <b>1,88</b>  |
| 11                                                    | Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang       |              | B             | 0,75         |
| 12                                                    | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata                            |              | C             | 0,50         |
| <b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b> |                                                                                                                 | <b>20,00</b> | <b>77,93%</b> | <b>15,59</b> |



Badan  
Pengembangan  
Keberlanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik/  
menggunkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK

|   |                                                    |               |                |              |
|---|----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|   | <b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>     | <b>7,50</b>   | <b>73,33%</b>  | <b>5,50</b>  |
| 1 | Target dapat dicapai                               |               | B              | 2,00         |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya   |               | A              | 1,50         |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan        |               | B              | 2,00         |
|   |                                                    |               |                |              |
|   | <b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>   | <b>12,50</b>  | <b>201,74%</b> | <b>10,09</b> |
| 4 | Target dapat dicapai                               |               |                | 3,78         |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya   |               |                | 1,30         |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan        |               |                | 5,00         |
|   |                                                    |               |                |              |
|   | <b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b> | <b>100,00</b> | <b>86,23%</b>  | <b>86,23</b> |



Revisi  
Keputusan  
Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN